

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

2025

PERDA NO.6 2025, 92 HLMN.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

ABSTRAK :

- Pengaturan mengenai kebijakan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dalam rangka menindaklanjuti Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.13.1/2025/Keuda tanggal 19 Mei 2025 hal Penyampaian Surat Pemberitahuan Hasil Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, memperhatikan nilai perekonomian di daerah serta untuk pelayanan kepada masyarakat dalam mengakses pelayanan dasar oleh Pemerintah Daerah dan mendorong kemudahan berusaha, iklim investasi yang kondusif, peningkatan daya saing daerah, dan penciptaan lapangan kerja yang luas maka Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu diubah;
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Semua undang-undang tersebut mengalami perubahan terakhir melalui UU No. 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara RI Tahun 2023 No. 41, Tambahan Lembaran Negara RI No. 6856), yang mengesahkan Perppu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang. UU No. 1 Tahun 2022 – Mengatur hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. UU No. 6 Tahun 2023 – Menetapkan Perppu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. UU No. 105 Tahun 2024 – Tentang pembentukan Kabupaten Sumedang sebagai daerah otonom di Provinsi Jawa Barat. PP No. 34 Tahun 2006 – Tentang jalan, mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan jalan. PP No. 69 Tahun 2010 – Tata cara pemberian insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah. PP No. 18 Tahun 2016, diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019 – Tentang perangkat daerah, struktur organisasi pemerintah daerah. PP No. 12 Tahun 2019 – Tentang pengelolaan keuangan daerah. PP No. 16 Tahun 2021

- Pelaksanaan UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. PP No. 22 Tahun 2021 – Tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. PP No. 34 Tahun 2021 – Tentang penggunaan tenaga kerja asing. PP Nomor 4 Tahun 2023 Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848); PP Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881); Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 42);

CATATAN :

- Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, Tanggal 12 Juni 2025 di Kabupaten Sumedang.